

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Gereja merupakan tempat ibadah untuk orang yang beragama Kristen. Bahkan bukan dalam hal itu saja, gereja juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti rapat dewan pastoral paroki atau stasi, latihan paduan suara, atau rapat oleh kelompok-kelompok kategorial yang bisa disesuaikan dengan keadaan paroki atau stasi tersebut yang masih belum memiliki aula atau gedung serbaguna sesuai dengan kebijakan dari dewan pastoral dan pastor paroki setempat yang ada di dalam gereja tersebut. Gereja, sebagaimana yang dikatakan oleh Kitab Suci, adalah Tubuh Kristus, dan Gereja Katolik mengajarkan bahwa Gereja merupakan satu kesatuan tubuh dari umat beriman di dalam surga dan di atas bumi.

Organisasi Gereja sama halnya dengan organisasi pada umumnya yang memiliki struktur kepengurusan dalam organisasi. Dalam Gereja Katolik kepengurusan disebut dengan Dewan Pastoral Paroki (DPP) namun masih di bawah dalam pimpinan Pastor Paroki. Dalam kepengurusan DPP, ada pedoman dasar dewan atau yang secara umum dikenal sebagai uraian kerja atau *job description*. Pengurus yang terlibat dalam organisasi Gereja bukanlah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut melainkan lebih kepada memberi diri. Memberi diri disini yang berarti keikhlasan dari dalam diri sendiri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diemban seraya untuk melayani Tuhan sendiri.

Di dalam gereja tidak hanya dibutuhkan dalam hal manajemen kepemimpinan, melainkan juga dibutuhkan manajemen dalam hal keuangan. Mengingat pentingnya manajemen keuangan dalam gereja, karena sumber keuangannya pun tidak tetap maka dibutuhkanlah manajemen keuangan pada organisasi gereja. Sumber dana didalam Gereja terdiri dari derma yang diberikan oleh umat pada setiap kali ibadah sabda atau

misa di gereja, uang pembangunan, sumbangan dari umat atau persepuluhan, yang dimana persepuluhan merupakan pemberian umat yang secara ikhlas dan tulus untuk gereja dengan menyisihkan kelebihan dari pendapatan yang diterima dengan kata lain 10% dari penghasilan yang diterima dari umat tersebut, dan bantuan dari pihak luar yakni bantuan dari pemerintah yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan gereja, maka dari itu harus dikelola sumber dana tersebut karena sumber dana merupakan bantuan dari umat dan pemerintah setempat. Untuk itu, dibutuhkan adanya sebuah pertanggungjawaban atas apa yang diterima dari umat dan pemerintah untuk Gereja itu sendiri.

Dalam pengelolaan keuangan gereja, aspek akuntabilitas sangat diperlukan untuk meyakinkan para umat bahwa uang yang diberikan untuk gereja dikelola dan didistribusi sesuai amanah begitu pun dengan informasi keuangan yang ada di dalam gereja tersebut. Praptomo (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk nyata dari akuntabilitas, yang mempunyai fungsi sebagai media menjembatani para pengelola organisasi atau pengurus DPP dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* dalam hal ini para umat di gereja. Laporan keuangan menjadi penting karena didalamnya memuat informasi mengenai bagaimana organisasi mengelola sumber keuangan yang ada, berapa besar sumber daya yang dimiliki, serta apa saja pencapaian yang telah diraih dengan sumber daya tadi (Nainggolan,2012 dalam Praptomo,2015).

Organisasi gereja atau organisasi keagamaan seperti masjid, pure, wihara, merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari laba melainkan bertujuan untuk mensejahterakan para umat, jemaat, dan para jamaah yang ada. Oleh karena itu, Gereja dituntut untuk melakukan proses akuntabilitas dan transparansi karena keduanya sangat penting. Dengan begitu juga bisa meyakinkan para pemakai laporan keuangan Gereja yakni para umat bahwa informasi yang disampaikan telah sesuai.

Dalam PSAK No. 45 menjelaskan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara

organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya (PSAK No 45).

Dalam suatu organisasi biasanya pelaporan laporan keuangan dilaporkan secara periodik, ada yang melaporkan secara triwulan, caturwulan, semesteran dan tahunan. Organisasi gereja pada umumnya, dan pada gereja Katolik khususnya di Ternate melaporkan laporan keuangannya setiap minggu kepada para umatnya melalui pengumuman gereja dan diberikan selebaran yang telah diperbanyak. Dalam selebaran tersebut berisi tentang informasi keuangan dan informasi lainnya yang ada di gereja tersebut.

Praptomo (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu organisasi dan kemampuan organisasi tersebut untuk bertahan. Kebenaran dalam pembuatan laporan keuangan sangat diperlukan. Agar laporan keuangan dapat ditelusuri kebenarannya maka laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh orang yang independen.

Dalam organisasi Gereja biasanya dana yang didapatkan dari umat melalui derma, sumbangan, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Gereja, dan dalam pembangunan Gereja kelak. Namun, lainnya halnya dengan Gereja Katolik yang ada di Ternate dimana sebagian dari derma yang diberikan umat pada setiap kali ibadah hari minggu di Gereja di alokasikan ke sekolah Katolik dalam hal ini Gereja mempunyai tanggung jawab tersendiri ambil bagian dalam sekolah Katolik ini.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba menjelaskan bagaimana pelaporan keuangan

organisasi nirlaba pada umumnya. Dimana tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang sumber daya bagi entitas nirlaba.

Dalam PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi nirlaba harus melaporkan laporan keuangannya dalam bentuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Praptomo (2015) laporan keuangan menjadi penting karena didalamnya memuat informasi bagaimana organisasi mengelola sumber keuangan yang ada, berapa besar sumber daya yang dimiliki, serta apa saja pencapaian yang dimiliki oleh perusahaan dari pencapaian atas sumber daya tersebut.

Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kalau laporan aktivitas sendiri menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Serta, catatan atas laporan keuangan berisi informasi atas laporan-laporan keuangan yang ada yakni laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang dijelaskan secara lebih detail dan terperinci. (PSAK Nomor 45,1997)

Penelitian Booth (1993) dalam Badu dan Hambali (2014) menjelaskan bahwa, pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, saat akuntansi dipraktikkan pada institusi

keagamaan. Peran akuntansi sebatas mendukung kegiatan spiritual, namun tidak terintegrasi dan menjadikan pengelola lebih melaksanakan tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan Akuntansi pada dasarnya adalah *tools* atau instrumen yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.

Penelitian bahwa praktik akuntansi di Masjid sudah dilakukan oleh Latif (2014) dan Hanafi (2015) yang menghasilkan bahwa objek yang diteliti oleh masing-masing peneliti masih menggunakan pengelolaan keuangan yang sederhana yang dimana hanya ada perincian, kas masuk, dan kas keluar. Simanjuntak dan Januarsi (2011) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid yang menghasilkan dalam pelaporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana dan tidak terjadinya *clash of jurisdictional* pada masjid Baitussalam. *Clash of jurisdictional* merupakan kebutuhan seorang ahli profesi dalam bidang yang diembannya dalam hal ini sebagai ahli profesi akuntansi.

Laughlin (1988) menjelaskan bahwa sistem kontekstual di Inggris dikatakan banyak intervensi dari pihak luar dan dari pihak luar tersebut ada hak untuk mengintervensi tetapi hanya dalam masalah keuangan gereja saja. Ada dua sistem akuntansi yakni *diocessan accounting* (akuntansi keuskupan) dan *central board* (dewan pusat) yang dipakai sebagai contoh sistem akuntansi sebagai pembanding untuk menyelesaikan sistem akuntansi gereja di Inggris. Tetapi *diocessan system* memiliki kekurangan dimana tidak mengetahui seluruh laporan keuangan yang ada tanpa adanya masukan yang signifikan tetapi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kecil. Kalau sistem *central board* lebih fokus kepada masalah tentang ketertarikan masyarakat Inggris kepada Gereja karena kurangnya minat untuk ke Gereja.

Sistem kontekstual akuntansi yang diadopsi ini, Laughlin (1988) menuntut adanya *income* tetap supaya dari dua system yang tadi berjalan sebagaimana adanya walaupun dengan segala kekurangan yang ada sudah dapat mencakup masalah yang ada seperti jemaat yang ada didalam gereja, pembangunan gereja yang dilakukan dengan uang dari gereja itu sendiri. Kurangnya kesadaran untuk mempublikasikan laporan keuangan walau

sesederhana dan yang mungkin menjadi masalah dasar dari gereja tersebut, karena kurangnya akan kesadaran dalam hal mempublikasikan laporan keuangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Alhaddad (2015) menghasilkan bahwa dalam masjid Al-Munawwar mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada pemberi dana dan mengenai transparansi keuangannya pun dilakukan secara terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat. Dalam masjid Al-Munawwar sendiri dilaksanakan akuntansi guna menyampaikan laporan kinerja dari para pengurus kepada pemberi dana, baik dari kinerja secara internal maupun eksternal, dan sebagai pemanfaatan pengendalian internal. Masjid Al-Munawwar sendiri bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja melainkan sebagai aktivitas ritual, muamalat, dan kebudayaan islam.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup penelitian yakni Gereja Katolik St. Willibrordus Ternate. Pengambilan objek sendiri dilakukan karena pada Gereja Katolik belum ada pelaporan keuangan secara periodik. Selain itu umat yang menyumbang di Gereja tersebut seperti fasilitas didalam Gereja tidak dimasukan dalam pelaporan akuntansi, bahkan disaat dalam bentuk penyampaian lisan pengurus DPP hanya memberikan pengumuman kalau ada seorang atau beberapa umat menyumbang dalam bentuk barang-barang seperti bunga hias didalam gereja, *sponge* untuk tempat berlutut umat, dan kursi-kursi yang akan digunakan di gereja namun belum diakui atau dicatat sebagai aset gereja yang akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Melihat kondisi ini, para umat sekarang sudah tidak lagi atau jarang menyumbang ke Gereja karena hal tersebut dan pelaporan keuangan secara periodik yang tidak dilakukan tiap akhir bulan atau minimal tiap akhir tahun untuk mengetahui pelaporan keuangan yang ada di dalam Gereja tersebut. Seperti organisasi lainnya yang pasti akan membutuhkan laporan pertanggungjawaban atas dana yang masuk dan dikeluarkan seperti laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Laughlin (1988) kurangnya kesadaran untuk dari para pengurus gereja atau DPP untuk memaparkan laporan

keuangan yang ada, disitulah para umat menanyakan tentang laporan keuangan yang ada dari gereja tersebut, sehingga hal itu menjadi persoalan.

Alasan yang lain dalam mengambil objek tersebut juga dilihat dari segi letak geografis dan keadaan dari objek yang dipilih. Gereja Katolik di Ternate sudah merupakan cagar budaya wilayah Kota Ternate yang dimana sering kita sebut sebagai Gereja Batu. Oleh karena itu, sebagai cagar budaya yang ada di Kota Ternate harusnya menjadi rujukan bagi Gereja-Gereja yang lain atau organisasi nirlaba pada umumnya dan khususnya di Kota Ternate untuk melaporkan laporan keuangannya secara periodik.

Peneliti termotivasi untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi dari pencatatan transaksi dalam hal ini uang masuk dan uang keluar yang terjadi pada Gereja tersebut sampai pada pelaporan laporan keuangan pada Gereja tersebut. Maka dari itu, adapun judul dari penelitian ini yakni "***Fenomena Praktik Akuntansi pada Gereja Katolik St. Willibrordus Ternate***"

1.2 Rumusan Masalah

Mengenai pembahasan konteks penelitian di atas, maka peneliti ingin melakukan riset tentang; Bagaimana praktik akuntansi pada Gereja Katolik yang ada di Kota Ternate ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menelusuri bagaimana praktik akuntansi yang ada didalam Gereja Katolik St. Willibrordus Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis : penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan akuntansi dalam hal keuangan gereja.
2. Manfaat praktik : hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran bagi gereja dalam hal pengelolaan keuangan.

3. Manfaat regulasi : hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi standar sektor Gereja dalam penyusunan standar untuk mengatur standar dalam pengelolaan keuangan Gereja.